

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TOLAI BARAT KECAMATAN TORUE KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sudirman Daeng Massiri^{*1}, Adam Malik¹, Imran Rachman¹, Luh Nova Setiawati²

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

²Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

^{*}Email Korespondensi; *sudi_untad@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Kondisi mangrove di Desa Tolai Barat masih terbilang baik, karena dapat dilihat dari kehijauan hutan mangrove yang membentang di sepanjang garis pantai yang kelestariannya masih sangat terjaga. Situasi ini diduga karena adanya pengaruh modal sosial kuat yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2017 di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* kepada tokoh-tokoh masyarakat dan metode random sampling untuk masyarakat umum. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat modal sosial yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan penskalaan dan kemudian dideskripsikan sesuai hasil yang di dapatkan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa modal sosial memiliki hubungan kuat terhadap kelestarian hutan. Modal sosial masyarakat di Desa Tolai Barat terbilang cukup kuat, seperti dapat diketahui bahwa modal sosial *bonding* terbilang kuat karena masyarakat Desa Tolai Barat memiliki sifat kebersamaan yang kuat serta memiliki solidaritas yang kuat dalam mengelola hutan mangrove. Modal sosial *bridging* tergolong kuat hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove memiliki persatuan yang kuat dimana mereka dalam mengelola hutan mangrove tidak membedakan suku, agama dan status sosial. Akan tetapi, modal sosial *linking* terbilang kategori sedang, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki jaringan yang luas berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove.

Kata kunci: modal sosial, hutan mangrove, norma, jaringan, kepercayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan pengelolaan hutan melalui pendekatan pengaturan dan kontrol (*command and control*) di Indonesia menghadapi tantangan implementasi pada kondisi pemerintah sebagai pengelola memiliki kapasitas tidak kuat (Massiri dkk., 2015). Situasi tersebut menyebabkan beberapa sumberdaya hutan di Indonesia menjadi akses terbuka (*open access*) yang pada akhirnya menimbulkan deforestasi dan kerusakan sumberdaya. Situasi ini banyak terjadi pada areal hutan mangrove, sehingga banyak mengalami deforestasi, padahal hutan mangrove itu memiliki peranan penting bagi masyarakat.

Indonesia memiliki sekitar 3,2 juta ha mangrove dunia dengan jumlah spesies mangrove yang ditemukan tidak kurang 75 spesies. Indonesia juga dikenal dengan negara jumlah mangrove terluas keanekaragaman hayati tinggi (Idrus dkk., 2017). Hutan mangrove dapat memberikan manfaat ekologi dan manfaat ekonomi. Manfaat ekologi hutan mangrove antara lain sebagai

pelindung pantai dan abrasi, penahan lumpur serta sebagai tempat berkembang biaknya hewan-hewan laut seperti ikan dan kepiting. Sementara itu, manfaat ekonomi hutan mangrove antara lain bahan makanan, bahan kosmetik, tempat untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan pendidikan. Kedua manfaat ini merupakan pertimbangan agar terus berkelanjutan. Hal ini tentunya akan sangat tergantung dari pengelolaan yang baik oleh *stakeholder* seperti pemerintah dan masyarakat yang terkait di dalamnya (Sukmawan, 2004).

Dalam sudut pandang kelembagaan, hutan mangrove termasuk dalam kategori sumberdaya *common pool resources* (CPRs). Karakteristik sumberdaya seperti ini memerlukan pengaturan pengelolaan yang tepat karena sulit untuk mengeluarkan pihak lain atas penggunaan sumberdaya ini dan pemanfaatan sumberdaya oleh satu pihak akan mengurangi jatah dan peluang pihak lain Ostrom (2009). Karakteristik sumberdaya ini berpeluang mengalami kerusakan jika tidak ada pengaturan pengelolaan yang tepat.

Kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia belum begitu mantap, yang dibuktikan dengan tidak jelasnya kewenangan pengelola. Ketidakjelasan kewenangan ini menjadi penyebab rusaknya sumberdaya tersebut. Akan tetapi, situasi ini tidak terjadi pada hutan mangrove di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Hutan mangrove di Desa Tolai Barat memiliki luas hutan mangrove sekitar 22 Ha. kondisi hutan mangrove yang membentang sepanjang garis pantai masih terjaga kelestariannya. Hasil penelitian Mardiyasa (2017) mengungkapkan hutan mangrove di Desa Tolai Barat memiliki tingkat kerapatan rata-rata tingkat semai adalah 916,66 btg/Ha, tingkat pancang sebesar 993,33 btg/Ha dan tingkat pohon adalah 850 batang/Ha.

Beberapa kajian mengemukakan bahwa kondisi hutan baik didukung oleh modal sosial masyarakat yang kuat (Ostrom dan Nagendra, 2006 ; Ekawati dan Nurrochmat, 2015). Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, Ostrom (1992) menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Potensi modal sosial masyarakat memiliki korelasi positif dengan upaya-upaya pelestarian hutan (Ekawati dan Nurrochmat 2015).

Konsep modal sosial umumnya merujuk pada tokoh utama di bidang modal sosial yaitu Pierre Bourdieu dan James Coleman (*sociologist*), dan Robert Putnam (*political scientist*) (Hawe dan Shiell 2000 dalam Ottebjer, 2005). Konsep modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*network*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi (Putnam 1993).

Kepercayaan, menurut Putnam (1993) didefinisikan sebagai bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin, bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung. Sementara itu, norma sosial mengacu pada aturan formal dan informal dalam pemanfaatan barang milik bersama dan akan memfasilitasi tindakan kolektif (Narayan-Parker, 1999) dan dianggap sebagai regulator dalam masyarakat (Coleman 1988).

Jaringan sosial dapat dibagi pada hubungan formal (misalnya, partisipasi dalam organisasi) dan informal (misalnya, jaringan hubungan dengan keluarga dan teman) dengan pendiri juga termasuk partisipasi masyarakat (Beugelsdijk dan Schaik 2005). Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan antara individu dalam komunitas. Grootaert *et al.* (2003) menyatakan bahwa hubungan atau jaringan sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga hal: (1) *bonding social capital* (atau keterkaitan horisontal); (2) *bridging social capital* (atau keterkaitan horisontal dengan pihak yang berbeda karakter); dan *linking social capital* (atau keterkaitan vertikal).

Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma-norma sosial (*social norm*) dan jaringan sosial (*social networking*) secara nyata telah membantu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan serta modal sosial telah menjadi energi positif dan beberapa sebagai *essential contributor factor* dalam mengelola sumber daya hutan sehingga dapat memberikan kelestarian hutan (Suharjito dan Saputro, 2017). Dengan demikian, kajian-kajian tentang modal sosial masyarakat yang sukses dalam melakukan pengelolaan hutan penting dilakukan untuk menguatkan temuan-temuan yang mendukung konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

Kegunaan dari penelitian ini adalah menguatkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan data dan informasi yang diperoleh sebagai input bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan mangrove.

METODE PENELITIAN**Waktu dan Tempat**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan November sampai Desember 2018, di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah a) kuisisioner digunakan sebagai pengumpulan data di lapangan, b) kamera sebagai alat dokumentasi, c) alat tulis-menulis sebagai alat mencatat hal-hal penting, dan d) kalkulator sebagai alat bantu hitung.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan terdiri atas pemahaman masyarakat tentang kondisi hutan mangrove, kepercayaan masyarakat, norma-norma dan jaringan dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini yaitu keadaan umum lokasi penelitian meliputi keadaan fisik lokasi penelitian serta data penunjang yang diperoleh dari sumber yang terkait yakni instansi-instansi atau aparat-aparat desa terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada populasi masyarakat Desa Tolai Barat, dengan menggunakan kuisisioner. Responden yang diambil berdasarkan Aarikunto (1999), yaitu jika penelitian mempunyai beberapa ratus atau beberapa subjek dalam populasi maka dapat diambil sampel $\pm 25-30\%$ dari jumlah subjek tersebut. Dengan demikian dari 118 kk diambil 30% sebagai sampel yaitu 35 KK yang terdapat pada Dusun V Desa Tolai Barat.

Responden yang dipilih adalah keterwakilan dari beberapa komponen yakni aparat desa, tokoh adat, tokoh pemuda, serta kelompok masyarakat. Responden yang berasal dari masyarakat umum dipilih melalui *random sampling* dengan jumlah (25 orang). Sedangkan responden lainnya ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* diantaranya aparat desa (2 orang), tokoh adat (3 orang), tokoh pemuda (2 orang) dan kelompok masyarakat (3 orang). Penelitian ini dilakukan melalui penggalian informasi dari hasil kuisisioner dan responden kunci. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menggambarkan suatu objek atau kondisi riil secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan temuan di lapangan.

Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penskalaan. Menurut Faisal (2008), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Tabel 1. Kriteria dan Indikator Penilaian Modal Sosial

Modal social	Kriteria	Indikator	Penilaian
Bonding	Kekompakan dengan sesame	Tingkat kekompakan atau kekeluargaan di desa Tolai Barat sehingga dapat bekerja sama dalam melestarikan hutan mangrove.	1. Kuat 3. Sedang 5. Rendah
	Kepercayaan dengan sesame	Tingkat kepercayaan sesama masyarakat desa Tolai barat terhadap hutan mangrove agar bisa tetap terjaga kelestariannya	1. Kuat 3. Sedang 5. Rendah
	Rasa memiliki	Tingkat rasa memiliki yang ada pada diri masyarakat di desa Tolai Barat terhadap kelestarian hutan mangrove	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
	Partisipasi di masyarakat	Tingkat keterlibatan dalam mengikuti kegiatan kelompok atau organisasi tentang pengelolaan hutan mangrove	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
Bridging	Kekompakan sosial	Tingkat kebebasan masyarakat desa terhadap orang-orang dari luar dengan latar belakang berbeda yang memanfaatkan secara bersama wilayah hutan mangrove yang ada di desa.	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
	Saling menghormati	Tingkat Keyakinan bahwa daerah Desa Tolai Barat adalah tempat dimana warganya saling menghormati perbedaan etnis.	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
	Status social	Tingkat kesamaan proporsi pendapatan yang ada di Desa Tolai Barat.	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
	Etnik	Tingkat kesamaan proporsi etnik yang ada di Desa Tolai Barat.	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
Linking	Partisipasi politik	Tingkat hubungan Masyarakat desa Tolai Barat terhadap anggota LSM, yang memungkinkan bisa di ajak bekerja sama dalam melestarikan hutan mangrove	1. Kuat 3. Sedang 5. Rendah
	Aktivitas politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti pertemuan tentang pembahasan program atau mengkritik kebijakan	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah
	Pengaruh politik	Tingkat kekuatan masyarakat Desa Tolai Barat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan desa/lokal	1. Kuat 3. Sedang 5. Rendah
	Kepercayaan politik	Tingkat kepercayaan masyarakat Desa Tolai Barat terhadap aparat desa yang berwenang.	1. Tinggi 3. Sedang 5. Rendah

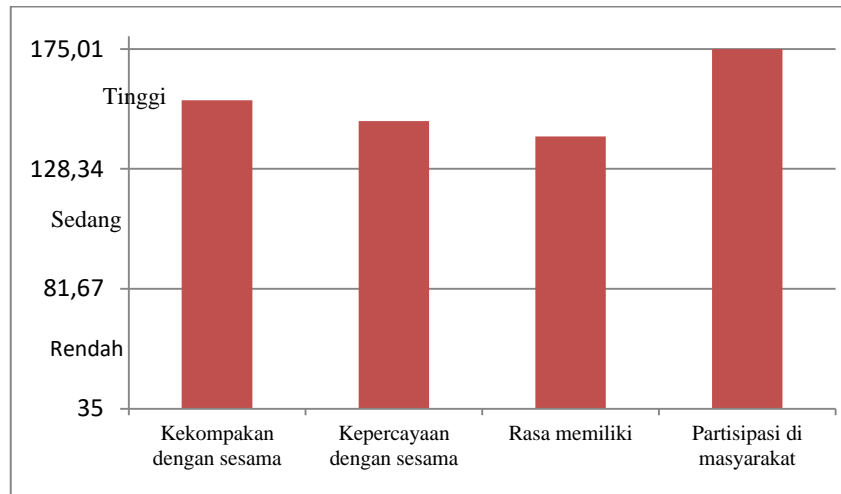
Untuk melakukan penskalaan dengan metode ini, setiap responden akan diminta untuk menanyakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di dalam kuisisioner yang berkaitan dengan tipe-tipe modal sosial diantaranya *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital*. Dimana pertanyaan tersebut akan disajikan dalam kuisisioner, dari jawaban responden pada kuisisioner akan ditentukan skor atau bobot dari masing-masing jawaban sesuai dengan tingkat jawaban yang diberikan oleh responden (Tabel 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial Bonding (*Bonding Social Capital*)

Modal sosial bonding suatu kelompok masyarakat yang lebih menjaga dan mengutamakan solidaritas atau kebersamaan pada hal-hal yang dianggap nyata dan akan memerikan manfaat bersama dalam suatu masyarakat sesuai dengan tuntunan nilai dan norma. Modal sosial bonding di Desa Tolai Barat terbilang tinggi, ini dapat dilihat dari kriteria modal sosial yang dimiliki

masyarakat seperti kekompakan dengan sesama, kepercayaan dengan sesama, rasa memiliki dan partisipasi di masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.



Gambar 1. Kondisi Modal Sosial Bonding

Kekompakan masyarakat di Desa Tolai Barat tergolong tinggi dengan nilai kriteria yaitu 155. hal ini dikarenakan masyarakat desa saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan mangrove seperti melaksanakan kegiatan monitoring hutan mangrove agar tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan. Selain itu masyarakat desa juga memiliki anggapan bahwa rasa kekompakan dan solidaritas yang memberikan mereka kemudahan dalam melakukan kerja sama khususnya dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan mangrove tersebut, karena masyarakat desa paham bahwa hutan mangrove memiliki banyak manfaat. Menurut Syahriar dan Darwanto (2015), modal sosial bonding merupakan suatu kelompok masyarakat yang lebih menjaga dan mengutamakan solidaritas atau kebersamaan pada hal-hal yang dianggap nyata dan akan memberikan manfaat bersama dalam suatu masyarakat sesuai dengan tuntunan nilai dan norma.

Kepercayaan dengan sesama masyarakat Desa Tolai Barat tergolong tinggi dengan nilai 147, hal ini dikarenakan tingginya keyakinan pada masing-masing masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan mangrove ke arah yang lestari yaitu untuk melindungi hutan mangrove dari kerusakan, dengan menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Adapun aturan tersebut yaitu dilarang menebang pohon mangrove serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak kawasan sekitar hutan tersebut dan jika ada masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. kepercayaan ini akan menumbuhkan suatu kemampuan yang ada dalam suatu masyarakat untuk menjalankan sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan nantinya akan memberikan keuntungan bersama.

Dengan adanya aturan inilah masing-masing masyarakat mempunyai rasa percaya terhadap sesama anggota masyarakat desa bahwa kelestarian hutan mangrove akan bisa terjaga karena telah ada aturan yang mengikat bahwa hutan mangrove harus tetap dijaga kelestariannya. Menurut Fukuyama dalam Widjanarko (2016), bahwa salah satu kekuatan dalam modal sosial adalah kepercayaan karena melalui kepercayaan maka akan timbulnya suatu kemampuan yang ada dalam suatu masyarakat untuk menjalankan sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan nantinya akan memberikan keuntungan bersama.

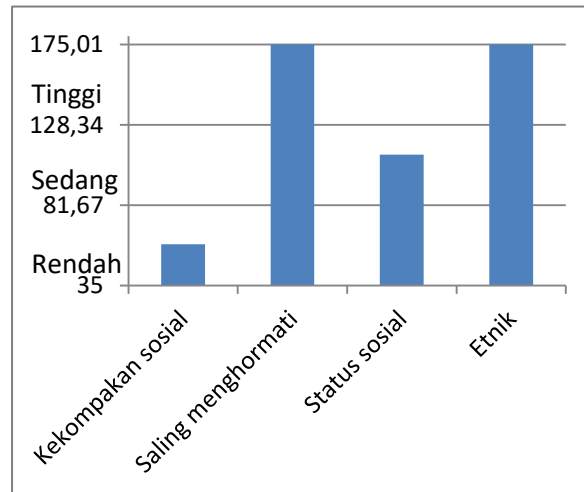
Rasa memiliki masyarakat terhadap hutan mangrove tergolong tinggi dengan nilai 141, ini dikarenakan masyarakat telah mengetahui pentingnya peranan dari hutan mangrove untuk kehidupan mereka seperti masyarakat telah merasakan manfaat ekologi dan ekonomi serta masyarakat Desa juga telah menganggap bahwa hutan mangrove merupakan aset desa yang harus dijaga dan dipertahankan.

Partisipasi masyarakat tergolong tinggi dengan nilai sebesar 137, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki keterlibatan dan kesadaran dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove

dari ancaman-ancaman kerusakan serta masyarakat juga ingin mengetahui lebih dalam cara perawatan hutan mangrove yang benar agar dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat lainnya tentang pentingnya manfaat hutan mangrove. Partisipasi yang tinggi ini didasari oleh kepercayaan akan manfaat hutan mangrove dan adanya rasa memiliki (*sense belonging*) terhadap hutan mangrove di wilayahnya.

Modal Sosial Bridging (*Bridging Sosial Capital*)

Modal sosial Bridging di Desa Tolai Barat terbilang tinggi, ini dapat diketahui dari kriteria modal sosial yang dimiliki masyarakat seperti kekompakan sosial, saling menghormati, status sosial, dan etnik. Meskipun memiliki nilai saling menghormati yang tergolong tinggi, namun kekompakan sosial tergolong rendah dalam artian masyarakat desa Tolai Barat tidak memberikan kebebasan kepada orang-orang dari luar desa yang ingin ikut memanfaatkan wilayah hutan mangrove tanpa adanya izin dari kepala desa maupun aparat desa yang berwenang atas pengelolaan hutan mangrove. Hal ini akan menghindari open akses terhadap sumberdaya hutan. Modal Sosial *Bridging* masyarakat desa Tolai Barat dalam pengelolaan hutan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kondisi Modal Sosial *Bridging*

Kekompakan sosial di Desa Tolai Barat tergolong rendah dengan nilai sebesar 59, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memberikan kebebasan kepada orang-orang dari luar desa yang ikut memanfaatkan wilayah hutan mangrove tanpa adanya izin dari kepala desa maupun aparat desa yang berwenang atas pengelolaan hutan mangrove. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Tolai Barat tidak ingin terjadinya keterbukaan akses yang justru akan menjadikan hutan mangrove menjadi rusak karena adanya pemanfaatan yang egatif dan tidak terkontrol oleh orang-orang dari luar yang tidak melibatkan prinsip lestari. Menurut (Ancok,2003) bahwa modal sosial akan berpengaruh buruk jika dimiliki oleh kelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, sebab solidaritas dan kerja sama yang baik akan dapat digunakan ke arah yang buruk yang sifatnya individualistik.

Saling menghormati dalam masyarakat Desa Tolai Barat tergolong tinggi dengan nilai sebesar 175, ini dikarenakan masyarakat memiliki persatuan yang kuat dalam bermasyarakat sehingga timbul rasa saling menghargai antara satu sama lain dalam diri masyarakat.

Sikap saling menghormati ini sangat penting dalam menunjang terciptanya rasa kebersamaan. Menurut Schwart *dalam* Ancok (2003), bahwa modal sosial merupakan aspek nilai yang mengandung keharmonisan masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya agar tetap menjaga hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya.

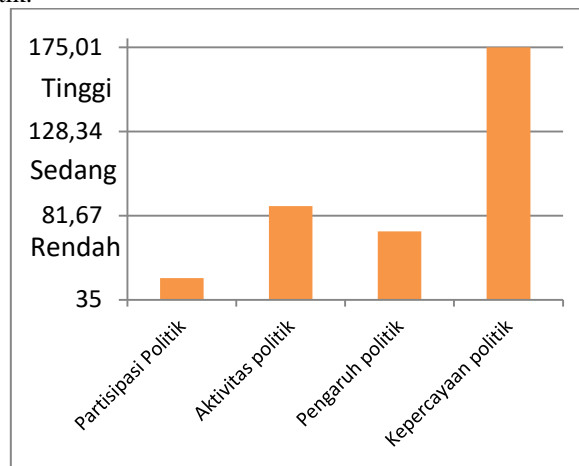
Status sosial masyarakat Desa Tolai Barat tergolong sedang dengan nilai sebesar 111, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki jumlah pendapatan yang relatif sama, dimana kesamaan proporsi pendapatan ini disebabkan masyarakat mempunyai mata pencarian dan aset yang sebagian relatif sama yaitu sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal ini menjadi

salah satu pemicu masyarakat untuk saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya karena peranan hutan mangrove sangat penting untuk keberlangsungan mata pencarian masyarakat.

Etnik masyarakat Desa Tolai Barat tergolong tinggi dengan nilai sebesar 175, ini dikarenakan masyarakat didominasi oleh salah satu etnik. Walaupun Desa Tolai Barat didominasi oleh salah satu etnik yang sama, ini tidak menghalangi kebersamaan dan kekompakan dengan etnik yang lainnya. Mereka tetap saling menjaga rasa persatuan dan sifat toleransi seperti masyarakat melakukan kerja bakti bersama dan membentuk kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove, tanpa memandang adanya perbedaan suku. Menurut Syahriar dan Darwanto (2015) *bridging social capital* bersifat heterogen karena di dalamnya terdapat suku, latar belakang dan budaya yang berbeda dimana setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan serta akumulasi ide sehingga modal sosial ini bisa lebih berkembang.

Modal Sosial Jaringan (*Linking Social Capital*)

Modal Sosial Jaringan di Desa Tolai Barat terbilang Sedang ini dapat Diketahui dari kriteria modal sosial yang dimiliki masyarakat seperti partisipasi politik, aktivitas politik, pengaruh politik dan kepercayaan politik.



Gambar 3. Kondisi Modal Sosial *Linking*

Partisipasi Politik masyarakat Desa Tolai Barat tergolong rendah dengan nilai sebesar 47, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki hubungan atau koneksi dengan pihak luar seperti anggota-anggota LSM (lembaga Swadaya Masyarakat). Masyarakat desa kurang mengetahui keberadaan dari anggota tersebut sehingga LSM tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan hutan mangrove. Masyarakat Desa Tolai Barat sudah terbiasa bekerja sama dinas-dinas tertentu yang berhubungan dengan pelestarian hutan mangrove dan lingkungannya. masyarakat Desa lebih bisa bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pengelolaan hutan mangrove sehingga masyarakat bisa mendapat pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan hutan mangrove melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan kepada kelompok-kelompok nelayan dan kelompok mangrove. Masyarakat lebih mengetahui dan memahami cara mengelola mangrove ke arah yang lebih lestari lagi tanpa harus merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini juga sejalan dengan Presetiarmartati *dkk.* (2016) bahwa agar sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai tersebut terlaksana dengan baik maka sebuah anggota masyarakat setidaknya harus memiliki sebuah koneksi atau hubungan dengan pihak luar seperti anggota parlemen, polisi dan kepala daerah serta instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

Aktivitas politik masyarakat Desa Tolai Barat tergolong sedang dengan nilai kriteria sebesar 87, ini dikarenakan ada sebagian masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga membatasi mereka untuk ikut bergabung dalam pembahasan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove.

Pengaruh politik masyarakat Desa Tolai Barat tergolong rendah dengan nilai sebesar 73, ini dikarenakan tidak semua masyarakat mampu mempengaruhi keputusan-keputusan desa dimana, setelah keputusan yang telah dibuat harus berdasarkan persetujuan dari semua pihak anggota yang terlibat dalam suatu organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam menentukan keputusan desa.

Kepercayaan politik masyarakat Desa Tolai Barat tergolong tinggi dengan nilai kriteria sebesar 175, ini dikarenakan masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap aparat desa yang berwenang. masyarakat percaya bahwa aparat desa mampu mengkoordinir masyarakat untuk saling bekerja sama dalam suatu kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta masyarakat juga percaya bahwa aparat desa mampu menjaga keeratan hubungan di masyarakat. Kepercayaan politik masyarakat desa Tolai barat tergolong tinggi karena masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap aparat desa yang berwenang, dan instansi pemerintah. ini merupakan faktor pendorong bagi tindakan kolektif masyarakat

SIMPULAN

1. Modal sosial masyarakat di Desa Tolai Barat terbilang cukup tinggi. Modal sosial bonding yang kuat meliputi kekompakan dengan sesama, kepercayaan dengan sesama, rasa memiliki dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama yang mendukung pengelolaan hutan mangrove lestari.
2. Kepercayaan politik khususnya kepercayaan terhadap aparat desa merupakan energi pengungkit dan pendorong yang dapat mengaktivasi modal sosial masyarakat agar bersepakat melakukan suatu aksi bersama dalam pengelolaan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Psikologika: Jurnal Pemikiran dan penelitian Psikologi 8 (15): 4-14.
- Arikunto, S., (1999). *Prosedur Penelitian*. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beugelsdijk S, Van Schaik T. 2005. Social capital and growth in European regions: an empirical test. *European Journal of Political Economy* 21(2):301-324.
- Coleman JS. 1988. Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*:S95-S120.
- Ekawati S, Nurrochmat DR. 2015. Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11(1):14.
- Faisal, S., (2008). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press, Jakarta
- Grootaert C. 2001. *Does social capital help the poor?-a synthesis of findings from the local level institutions studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia*: The World Bank.
- Idrus, S., Ismail, A., & Ekayani, M. (2017). Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan Mangrove Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pertanian Indonesia*, 21 (3): 195-202.
- Mulyadi, E., Hendriyanto, O., & Fitriani, N. (2010). *Konservasi hutan mangrove sebagai ekowisata*. Teknik Lingkungan, 1: 51-57.
- Mardiyasa, I. N. *Potensi Ekowisata Mangrove Di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong*. [Skripsi]. Palu. : Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. 2017
- Massiri, S. D., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., and Soekmadi, R. 2015. Institutional Sustainability Barriers of Community Conservation Agreement as a Collaboration Management in Lore Lindu National Park. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 21, 147-154.
- Narayan-Parker D. 1999. *Bonds and bridges: Social capital and poverty*: World Bank Publications.
- Ostrom, E. 2009. *Governing the commons*, Cambridge university press.
- Ottebjør L. 2005. Bourdieu, Coleman and Putnam on Social Capital. Applications in Literature and Implications for Public Health Policy and Practice. *Thesis*, Karolinska Institutet.

- Prasetyamartati, B., Fauzi, A., Dahuri, R., Fakhrudin, A., & Lange, H. (2016). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 13 (1), 7-19.
- Pontoh, O. (2010). Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 6(3): 125-133.
- Perum Perhutani 2001. Keputusan Ketua Dewan Pengawas PT. Perhutani. No 136/KPTS/DIR/2001 Tentang *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Perum Perhutani. Jakarta
- Putnam RD. 1993. The prosperous community. *The american prospect* 4(13):35-42.
- Sukmawan, D. 2004. *Penilaian Ekonomi Manfaat Hutan Mangrove* di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat.
- Sukardjo, S. 1984. *Ekosistem mangrove*. *Jurnal Lembaga Oseonologi Nasional, LIPI, Jakarta*, 110-111
- Syahriar, G. H., & Darwanto, D. 2015. Modal Sosial Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Colo Kabupaten Kudus, *Disertasi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Suharjito, D., & Saputro, G. E. 2017. Modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(4): 317-335.
- Widjanarko, M. (2016). Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtawu: Studi Kasus Pelestarian Hutan Muria Di Kabupaten Kudus The Social Capital Of Rahtawu Comunity: A Case Study Of Forest Conservatian In Kudus Regency. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1): 109-122